

Penguatan Profesionalisme Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Melalui Perumusan Perda Di Kota Padang Panjang

Hafiz Muhamad Akbar

Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang

hafisma621@gmail.com

Abstrak

Dalam penguatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan menerapkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 di Kota Padang Panjang, dengan fokus pada konsep, tahapan, dan dampaknya di lapangan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memperoleh pendapat dari Ibu Maulida Armayulita, S.H., sebagai seorang ahli dalam perancangan peraturan perundang-undangan, untuk memahami lebih dalam proses legislasi dan implementasi regulasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan peraturan daerah ini melibatkan tahapan yang panjang dan kompleks, dimulai dari identifikasi isu publik, penyusunan agenda, perolehan legitimasi politik, pembuatan kebijakan, negosiasi dengan DPRD, hingga persetujuan kepala daerah dan tahap implementasi. Struktur pada artikel ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan penguatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian perumusan regulasi dengan kebutuhan lapangan serta konsistensi dalam pelaksanaannya. Keberlanjutan dan efektivitas regulasi ini bergantung pada sejauh mana implementasi tersebut diterjemahkan dalam praktik pendidikan yang sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Kata Kunci: Perda, DPRD, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Sekolah

PENDAHULUAN

Pendidikan berfungsi sebagai landasan mendasar pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Dalam rangka otonomi daerah, adalah tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerapkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan sumber daya manusia, khususnya guru dan tenaga kependidikan lainnya. Salah satu kota progresif yang ada di Sumatera Barat adalah Padang Panjang, telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bagian dari komitmen daerah untuk memperkuat sistem pendidikan yang profesional dan berkualitas tinggi.

Beberapa aspek pendidikan harus disiapkan dalam implementasi Peraturan Daerah, khususnya dalam hal peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan lainnya. Selain kompetensi dengan materi dan pedagogi, profesionalisme di sektor pendidikan juga memerlukan kejujuran moral, fleksibilitas dalam menanggapi perubahan kurikulum, serta penguasaan teknologi informasi. Dalam kerangka ini, peningkatan profesionalisme merupakan rencana strategis untuk menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Namun demikian, upaya untuk membangun profesionalisme menghadapi tantangan yang cukup rumit. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa hambatan utama meliputi minimnya pelatihan berkesinambungan, keterbatasan dana, serta kurang sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu, perbedaan dalam akses terhadap fasilitas pendidikan serta ketimpangan mutu antar institusi pendidikan mengharuskan adanya langkah intervensi yang sistematis dan berkesinambungan. Oleh karena itu, upaya penguatan profesionalisme harus disusun berdasarkan kondisi lokal, dengan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak dan menekankan kerja sama.

Untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru dan administrasi sekolah, penguatan profesionalisme tenaga pendidik juga konsisten dengan orientasi kebijakan nasional. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 berfungsi sebagai panduan utama untuk menyusun rencana praktik pelatihan pendidik, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas di lingkungan Padang Panjang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Peraturan Daerah diimplementasikan dan memberikan rencana aksi yang dapat meningkatkan profesionalisme tenaga pengajar secara keseluruhan.

Struktur artikel ini tidak mudah, tetapi cukup kompleks dan rumit, dengan uraian yang muncul dari proses penulisan, termasuk abstrak, pendahuluan, dan metode. Selanjutnya, pada bagian pertama kajian yang terdiri dari beberapa poin yang berasal dari identifikasi dan analisis isu hingga evaluasi dan implementasi, kesimpulan diberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan penelitian.

METODE

Metode penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, yang melibatkan penelaahan dan analisis mendalam terhadap data mentah. Data ini meliputi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan kajian berbagai sumber tertulis serta dokumentasi. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan informasi dari beragam sumber, baik berupa tulisan (seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian) maupun catatan wawancara naratif dengan narasumber. Wawancara ini dilakukan saat observasi lapangan langsung di DPRD Padang Panjang. Selain itu, dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian juga turut disertakan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan memilih literatur serta hasil wawancara yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya secara seksama untuk mengidentifikasi variabel-variabel utama dan informasi krusial yang mendukung penelitian. Temuan dari analisis ini kemudian diorganisasikan secara sistematis dan diintegrasikan ke dalam artikel ilmiah untuk menghasilkan kesimpulan yang menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Masalah dan Perumusan Isu

Proses awal dalam penguatan profesionalisme pendidik di Kota Padang Panjang dilakukan melalui identifikasi berbagai persoalan yang dihadapi tenaga kependidikan. Hasil pengamatan lapangan dan data dari Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar guru menghadapi keterbatasan akses terhadap pelatihan berkelanjutan serta rendahnya penguasaan teknologi pendidikan. Di samping itu, adanya kesenjangan kompetensi antar sekolah swasta dan negeri menambah kompleksitas tantangan pendidikan lokal.

Perumusan isu dalam konteks ini mengarah pada kebutuhan untuk menyusun kebijakan berbasis kebutuhan lokal yang mampu menjembatani gap kompetensi tersebut. Dalam hal ini juga disebutkan bahwa efektivitas pelaksanaan Perda sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam menganalisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan secara aktual dan partisipatif. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan responsif terhadap dinamika pendidikan daerah.

Penentuan Agenda Kebijakan

Setelah isu utama diidentifikasi melalui serangkaian analisis mendalam dan komprehensif, tahapan selanjutnya yang krusial dalam siklus kebijakan publik adalah menentukan agenda kebijakan yang secara eksplisit menempatkan pengembangan profesionalisme sumber daya manusia sebagai pilar fundamental dan tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas layanan. Pemerintah Kota Padang Panjang, menunjukkan responsibilitas dan visi ke depan yang kuat, mengambil langkah strategis dengan mengintegrasikan secara sistematis target-target penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ke dalam kerangka kerja dokumen perencanaan daerah yang bersifat strategis dan jangka panjang, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai landasan operasional untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, proyeksi program-program pelatihan guru yang inovatif dan berkelanjutan, inisiatif sertifikasi kompetensi yang terstandarisasi dan diakui secara nasional, serta upaya digitalisasi proses pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi prioritas utama yang mendapatkan alokasi sumber daya dan perhatian yang signifikan.

Hal ini secara jelas mengindikasikan bahwa proses penentuan agenda kebijakan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan lokal dan aspirasi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan tingkat relevansi program-program intervensi terhadap para pelaku utama pendidikan, termasuk guru, tenaga kependidikan, siswa, dan masyarakat secara luas. Agenda strategis penguatan profesionalisme ini pun disusun dengan perspektif jangka menengah dan panjang, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan implementasi dan kemampuan untuk diukur kemajuannya melalui indikator-indikator kinerja yang jelas dan terdefinisi, sehingga memastikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap kualitas pendidikan di Kota Padang Panjang.

Pengesahan dan Dukungan Politik

Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022, yang memiliki implikasi signifikan terhadap tata kelola dan pengembangan sektor pendidikan di wilayah ini, secara inheren tidak dapat dipisahkan dari peran aktif dan konstruktif yang dimainkan oleh lembaga legislatif daerah dalam kapasitasnya sebagai representasi aspirasi masyarakat. Peran krusial ini terwujud dalam pemberian dukungan politik yang substansial dan berkelanjutan terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Dukungan ini secara konkret mencakup persetujuan alokasi anggaran pendidikan yang memadai dan proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pemberian dorongan yang kuat terhadap inisiatif reformasi regulasi pendidikan yang secara fundamental berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa secara komprehensif. Sinergi dan kolaborasi yang efektif antara pihak eksekutif daerah, yang memiliki tanggung jawab dalam perumusan dan implementasi kebijakan, dan pihak legislatif daerah, yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan, terbukti secara signifikan mempercepat keseluruhan proses legislasi peraturan daerah yang strategis ini.

Dukungan politik yang kuat juga dapat terlihat dalam penyediaan alokasi dana insentif yang ditujukan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja para pendidik, serta pembentukan unit kerja khusus yang memiliki mandat untuk secara fokus menangani pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan dan terstruktur. Tingkat keberhasilan suatu regulasi daerah, terutama dalam sektor yang kompleks dan vital seperti pendidikan, sangat ditentukan oleh tingkat koherensi dan keselarasan pandangan di antara para aktor politik yang memiliki pengaruh dalam mengawal setiap tahapan proses

legislasi hingga implementasi kebijakan pendidikan di lapangan, sehingga memastikan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Rancangan dan Penyusunan Kebijakan

Tahapan penyusunan kebijakan dalam implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2022 Kota Padang Panjang dimulai melalui uji publik dan dialog interaktif bersama berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan substantif dari pihak yang terdampak langsung, seperti guru, kepala sekolah, organisasi profesi, dan komunitas pendidikan lainnya. Pendekatan partisipatif ini menciptakan legitimasi sosial bagi regulasi yang akan diberlakukan, serta mendorong keterlibatan aktif dalam pelaksanaannya.

Pemerintah daerah juga menjalin kolaborasi erat dengan lembaga akademik dan pusat pelatihan pendidikan guna merumuskan regulasi teknis pendukung. Beberapa fokus utamanya meliputi penyusunan modul pelatihan berbasis kebutuhan kompetensi lokal, penguatan literasi teknologi pendidikan, serta integrasi nilai-nilai etika profesi dalam pengembangan karier tenaga kependidikan. Hasil dari kolaborasi ini dituangkan dalam bentuk pedoman teknis dan program pelatihan berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan perda secara operasional di lapangan.

Keterlibatan kepala sekolah dan tokoh pendidikan lokal sangat krusial dalam merancang strategi pengembangan profesionalisme yang kontekstual dan berdaya guna. Dalam forum penyusunan kebijakan, para pemangku kepentingan bertindak sebagai mitra aktif, bukan sekadar objek regulasi. Proses ini memperkuat daya adaptif kebijakan terhadap perubahan lingkungan pendidikan, serta menjamin keberlanjutan program peningkatan kualitas guru di masa mendatang.

Pembahasan serta Pengesahan Rancangan Perda

Proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Padang Panjang dilakukan melalui beberapa tahapan formal dan substantif di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD. Tahap awal diawali dengan penyusunan naskah akademik oleh tim ahli kebijakan pendidikan, yang kemudian menjadi rujukan utama dalam penyusunan draf Raperda. Dalam pembahasan internal DPRD, Bapemperda menekankan pentingnya harmonisasi antara arah kebijakan pendidikan nasional dengan kebutuhan lokal. Poin penting yang menjadi fokus dalam diskusi adalah bagaimana kebijakan nasional seperti Program Guru Penggerak, Platform Merdeka Mengajar, dan Kurikulum Merdeka dapat dijadikan bagian dari strategi pendidikan lokal yang responsif terhadap karakteristik sosial, budaya, dan geografis Kota Padang Panjang.

Selanjutnya, Raperda menjalani proses uji publik yang melibatkan pemangku kepentingan dari kalangan guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil. Masukan dari publik diserap sebagai bahan revisi untuk menyempurnakan substansi pasal-pasal dalam Raperda. Proses ini mencerminkan pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan daerah yang demokratis. Setelah dilakukan harmonisasi antarinstansi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Hukum Setda Provinsi, Raperda akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2022 pada pertengahan tahun 2022. Perda ini menjadi dasar hukum pelaksanaan penguatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di kota tersebut, yang secara eksplisit mengatur pelatihan berkelanjutan, sistem evaluasi kompetensi, serta dukungan kesejahteraan tenaga pendidikan.

Implementasi Perda Tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Kota Padang Panjang

Setelah pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022, Pemerintah Kota Padang Panjang tidak berhenti pada aspek formalitas hukum semata. Dialog intensif dilanjutkan antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi profesi seperti PGRI, serta perwakilan masyarakat melalui forum konsultasi publik. Proses ini merupakan bentuk deliberasi kebijakan yang bertujuan memperkuat legitimasi sosial terhadap substansi Perda. Dengan melibatkan aktor-aktor kunci pendidikan dalam dialog terbuka, regulasi tersebut memperoleh kepercayaan publik dan menjadi lebih kontekstual dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pendekatan partisipatif ini juga memberikan ruang bagi penyesuaian implementasi kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Keterlibatan publik dalam proses ini mendorong akuntabilitas dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap arah kebijakan pendidikan. Deliberasi publik yang berlangsung tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membangun fondasi sosial yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan di tingkat satuan pendidikan. Kepala sekolah dan guru menjadi lebih terdorong untuk menginternalisasi nilai-nilai regulatif karena merasa menjadi bagian dari proses pembentukan kebijakan tersebut. Sebagai akibatnya, efektivitas kebijakan diukur bukan hanya dari kepatuhan administratif, tetapi juga dari tingkat partisipasi aktif dan dukungan implementatif dari akar rumput pendidikan. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari model kebijakan top-down menuju kolaboratif dan berbasis komunitas.

Evaluasi dari Implikasi Kebijakan

Evaluasi implementasi Perda menunjukkan adanya kemajuan dalam aspek kuantitatif, seperti peningkatan jumlah guru tersertifikasi dan jumlah pelatihan yang diikuti. Namun, secara kualitatif masih ditemukan tantangan dalam internalisasi nilai-nilai profesionalisme terutama di kalangan guru muda. Selain itu, evaluasi juga menunjukkan bahwa beberapa sekolah swasta belum sepenuhnya terintegrasi dalam skema pelatihan berbasis Perda karena keterbatasan akses informasi.

Sebagai rekomendasi, perlu adanya penguatan sistem reward dan coaching untuk mendorong internalisasi praktik profesional, serta perluasan jejaring pelatihan dengan LPTK di luar Sumatera Barat. Perlu juga penguatan sistem informasi manajemen pelatihan berbasis data agar kebijakan tidak hanya terukur secara administratif, tetapi juga mampu meningkatkan mutu pengajaran secara nyata di kelas.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022 di Kota Padang Panjang menunjukkan bahwa komitmen daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya ditunjukkan melalui produk regulatif, tetapi juga melalui strategi implementatif yang berbasis kolaborasi dan kebutuhan lokal. Penguatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan menjadi inti dari kebijakan ini, dengan pendekatan yang menggabungkan pelatihan berkelanjutan, dukungan politik, digitalisasi pendidikan, serta penguatan jejaring kelembagaan. Partisipasi aktif dari pemangku kepentingan lokal – termasuk guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan legislatif memperkuat legitimasi sosial dari kebijakan ini serta mendorong internalisasi nilai-nilai profesionalisme secara lebih efektif. Hal ini membentuk ekosistem kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap perubahan kurikulum dan perkembangan teknologi.

Namun demikian, proses evaluasi juga mengungkapkan berbagai tantangan yang masih perlu diatasi, seperti ketimpangan akses informasi antar sekolah, lemahnya internalisasi nilai profesionalisme di kalangan pendidik muda, serta kebutuhan integrasi pelatihan dengan sistem manajemen berbasis data yang kuat. Oleh karena itu, langkah lanjutan yang harus dilakukan mencakup penguatan sistem insentif berbasis kinerja, perluasan kolaborasi dengan LPTK nasional, serta pengembangan sistem informasi pelatihan yang memungkinkan pemantauan kualitatif dan kuantitatif secara berkelanjutan. Jika hal ini dapat diwujudkan secara konsisten dan terstruktur, maka Perda Nomor 7 Tahun 2022 akan menjadi model kebijakan pendidikan daerah yang efektif dalam menjamin mutu dan profesionalisme penyelenggara pendidikan

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam hal ini penulis telah menyampaikan ungkapan rasa syukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat, khususnya anggota DPRD Padang Panjang yang mana bagian Analisis Persidangannya dapat menerima langsung kedatangan dalam kunjungan untuk dapat memperoleh data hasil wawancara yang diperlukan untuk menyelesaikan artikel yang membahas Perda tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Padang Panjang. Dan tidak lupa pula dengan ucapan terima kasih terhadap Dosen pengampu mata kuliah peraturan dan perundang-undangan Pendidikan ini yang sudah memberikan arahan dan dukungan dalam menyelesaikan artikel sampai tuntas tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S., & Abdullah, M. (2021). Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Melalui Pengembangan Berbasis Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 27(1), 56–63.
- Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. (2021). Laporan Kinerja Pendidikan Tahun 2021. Padang Panjang: Dinas Pendidikan.
- Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. (2022). Laporan Tahunan Penguatan SDM Pendidikan. Padang Panjang: Disdik.
- Fauzi, R., & Zulkarnaen, H. (2021). Sinkronisasi Kebijakan Pendidikan Nasional dan Daerah dalam Penerapan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Pendidikan*, 9(2), 112–125.
- Ismail, M., & Sawaludin, S. (2023). Implementasi Program Sabtu Budaya. *Jurnal Profesi Pendidikan*.
- Mulyasa, H. E. (2022). Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah.
- Pemerintah Kota Padang Panjang. (2022). Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Solikhulhadi, M. F. (2021). Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru untuk Meningkatkan Mutu. *Jurnal Madinasika*.
- Syamsul, A. (2023). Evaluasi Implikasi Kebijakan Pendidikan Daerah. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 10(2), 117–129.
- Wulandari, F., & Ramadhani, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan Daerah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 29(2), 101–110.